

# DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Yth: 1. Para Pejabat dan Pegawai di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

- 2. Para Pimpinan, Hakim dan Pegawai Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Umum
- Para Pimpinan, Hakim dan Pegawai Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Umum di-

Seluruh Indonesia

#### **SURAT EDARAN**

### **NOMOR 3 TAHUN 2025**

#### TENTANG

# PELAPORAN GRATIFIKASI

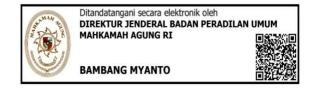
Dalam rangka mendorong peningkatan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepostisme di lingkungan Badan Peradilan Umum dengan merujuk pada Keputusan Nomor 119/KMA/SK/VII/2019 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya dan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI 29/BP/SK.PW1/V/2025 Nomor tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka dipandang perlu menegaskan kembali agar setiap Aparatur Peradilan d ibawah Peradilan Umum untuk melakukan pelaporan gratifikasi sesuai dengan aturan-aturan tersebut dengan memperhatikan hal-hal sebagai beikut:

- Setiap Hakim dan Aparatur Peradilan wajib menolak pemberian gratifikasi jika berhubungan dengan jabatan dan/atau berlawanan dengan kewajiban tugas. Apabila situasi tidak memungkinkan untuk ditolak, maka gratifikasi tesebut wajib dilaporkan.
- 2. Gratifikasi yang wajib dilaporkan, yaitu:



- a. Pemberian uang dan/atau setara uang (termasuk tapi tidak terbatas pada voucher dan cek), barang, fasilitas, dan/atau akomodasi yang diberikan sebagai ucapan terima kasih terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Hakim dan Aparatur;
- b. Pemberian dalam bentuk uang dan/atau setara uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima Hakim dan Aparatur dari Pegawai instansi lainnya, mitra kerja dan/atau pihak ketiga, termasuk tapi tidak terbatas dari notaris, perusahaan asuransi, bank, biro perjalanan, maskapai penerbangan, dan/atau perusahaan/kantor konsultan lainnya atas kerja sama/perjanjian kerjasama yang sedang berlangsung;
- c. Pemberian fasilitas transportasi, akomodasi, pemberian hiburan, paket wisata, fasilitas biaya pengobatan gratis, voucher dalam bentuk uang dan/atau setara uang sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Hakim dan Aparatur.
- 3. Setiap Hakim dan Aparatur Peradilan secara rutin wajib melaporkan penerimaan gratifikasi dan penolakan gratifikasi yang dianggap suap kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan/penolakan gratifikasi;
- 4. Pelaporan gratifikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:
  - a. Melalui aplikasi https://gol.kpk.go.id atau dengan mengunduh di aplikasi GOL di Google Play Store atau melalui App Store;
  - b. Melalui surat elektronik (e-mail) <u>pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id</u> dengan mengisi dan mengirimkan formulir sesuai format pada tautan <a href="https://bit.ly/mari\_laporgratifikasi">https://bit.ly/mari\_laporgratifikasi</a>;
  - c. Melalui UPG Badan Pengawasan jika gratifikasi diterima oleh hakim dan aparatur di lingkungan eselon I Mahkamah Agung melalui e-mail upg.bawas@mahkamahagung.go.id.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 14 Mei 2025



## Tembusan:

- 1. YM Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 2. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
- 3. YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 4. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;

